

Evaluasi Etika Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bima: Menjaga Dignitas dan Kesejahteraan Masyarakat

Wawan Mulyawan

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

Korespondensi penulis: wawanmulyawan22@yahoo.com

Abstract. *The aim of this study is to explore the ethical principles applied in the process of creating and implementing poverty alleviation policies in Kabupaten Bima, utilizing a qualitative descriptive approach. Informants were selected purposively, involving key figures such as government officials from the Social Services and Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Kabupaten Bima, academics, and community activists, to gather data through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings indicate that the success of these policies heavily depends on the implementation of transparency, distributive justice, and accountability. Transparency ensures that the policy process can be followed and monitored by the public, enhancing trust and community participation. Distributive justice promotes the fair allocation of resources, ensuring that all segments of society feel the benefits of the implemented policies. Meanwhile, accountability underscores the government's responsibility in managing and reporting resources fairly and honestly. This research also highlights the importance of using information technology to support transparency and enhance community participation, as well as strengthening the capacities of both government and communities to create an ethical and effective poverty alleviation system.*

Keywords: *ethics, poverty alleviation, policy, dignity.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip etika yang diterapkan dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bima, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pemilihan informan secara purposive, yang melibatkan figur-figur kunci seperti pejabat pemerintah melalui Dinas Sosial dan Bappeda Kabupaten Bima, akademisi, dan aktivis masyarakat, untuk mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada penerapan transparansi, keadilan distributif, dan akuntabilitas. Transparansi memastikan bahwa proses kebijakan dapat diikuti dan diawasi oleh publik, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Keadilan distributif mempromosikan alokasi sumber daya yang adil, memastikan bahwa semua segmen masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan yang diimplementasikan. Sementara itu, akuntabilitas menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola dan melaporkan sumber daya secara adil dan jujur. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya penggunaan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat kapasitas baik pemerintah maupun masyarakat untuk menciptakan sebuah sistem pengentasan kemiskinan yang etis dan efektif.

Kata kunci: etika, pengentasan kemiskinan, kebijakan, dignitas.

PENDAHULUAN

Etika dalam kebijakan publik di daerah adalah fondasi yang menjamin bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan integritas, keadilan, dan transparansi (Baumane-Vitolina et al., 2016) (Dwi Urip Wardoyo et al., 2021). Dalam prakteknya, etika membantu mengarahkan pembuatan kebijakan yang tidak hanya memenuhi tujuan efektivitas tetapi juga menegakkan prinsip moral yang mendukung kepentingan umum (Grönum, 2015) (Palijama et al., 2022). Prinsip ini sangat penting karena pemerintah daerah berperan langsung dalam menyediakan layanan dan regulasi yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warganya (Istan, 2017). Dengan menerapkan

Received Maret 10, 2024; Accepted April 16, 2024; Published Juli 30, 2024

*Wawan Mulyawan, wawanmulyawan22@yahoo.com

etika yang kuat, pemerintah daerah dapat menghindari kebijakan yang menguntungkan sekelompok kecil masyarakat saja atau kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Bisri & Asmoro, 2019) (Putri, 2017). Transparansi memainkan peran kunci di sini, memungkinkan masyarakat untuk mengikuti dan memahami proses pengambilan keputusan serta berpartisipasi dalam debat dan diskusi yang konstruktif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung legitimasi tindakan pemerintah (McDonald, 2018).

Selain itu, keadilan dan akuntabilitas adalah komponen penting lainnya dari etika dalam kebijakan publik di daerah (Chakrabarty & Erin Bass, 2015). Keadilan menuntut bahwa kebijakan harus diproses dan diimplementasikan dengan cara yang memastikan distribusi manfaat dan beban secara adil di antara semua segmen masyarakat, tanpa diskriminasi (Subhan, 2017). Akuntabilitas berarti bahwa pejabat publik harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada masyarakat (Alfianita et al., 2015). Mekanisme akuntabilitas yang efektif, seperti audit, evaluasi kebijakan, dan mekanisme umpan balik publik, membantu memastikan bahwa kebijakan publik dikelola dengan cara yang bertanggung jawab (Sutapa, 2018). Responsivitas juga sangat penting; kebijakan yang responsif menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan dan merespons kebutuhan dan tantangan yang dihadapi warganya secara aktif (Sururi, 2017) (Syakiran Akmal Ismail et al., 2018). Ini menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa dihargai dan bagian dari proses pembangunan, yang secara langsung mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan meningkatkan kualitas hidup di daerah tersebut (Widanti, 2022).

Namun menerapkan etika dalam pengambilan kebijakan publik sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kelemahan yang dapat menghambat efektivitas dan integritas proses tersebut (Ikhsania, 2015). Salah satu tantangan utama adalah konflik kepentingan, di mana individu yang terlibat dalam pembuatan kebijakan mungkin memiliki kepentingan pribadi atau profesional yang bertentangan dengan tugas mereka untuk melayani kepentingan umum (Ainley, 2017). Konflik kepentingan ini bisa bersifat finansial, seperti pemilik bisnis yang juga menjabat sebagai pejabat publik yang kebijakannya bisa menguntungkan bisnis pribadinya, atau bisa juga non-finansial, seperti tekanan dari kelompok kepentingan yang kuat yang mungkin mempengaruhi keputusan pejabat. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pembuatan kebijakan sering kali menyulitkan masyarakat untuk mengawasi dan memahami keputusan yang diambil, yang dapat mengarah pada skeptisisme dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah (Afkarina et al., 2023). Ketidaktransparanan ini

memperburuk potensi untuk nepotisme dan favoritisme, dimana kebijakan bisa jadi lebih melayani kepentingan pribadi daripada kepentingan publik (Budiman et al., 2022).

Kelemahan lain dalam menerapkan etika dalam kebijakan publik adalah kurangnya sumber daya dan pelatihan yang memadai bagi pejabat publik untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip etis secara efektif (Rizki Afri Mulia, 2022). Banyak pemerintah daerah yang berjuang dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, membuatnya sulit untuk membangun dan memelihara sistem yang mendukung etika yang kuat dalam pengambilan keputusan (Wateh, 2022). Selanjutnya, tantangan besar lainnya adalah resistensi terhadap perubahan dari dalam sistem (Halisa et al., 2022). Birokrasi yang sudah mapan sering kali menunjukkan keengganan untuk mengadopsi praktik baru yang lebih transparan atau lebih bertanggung jawab, karena hal ini mungkin mengganggu status quo dan kepentingan yang sudah tertanam (Dt, 2003). Dinamika kekuasaan dalam politik dan pemerintahan juga bisa menyebabkan tantangan, di mana pejabat dengan pengaruh lebih besar mungkin menggunakan posisi mereka untuk memanipulasi atau mengabaikan protokol etis demi mencapai tujuan politik atau pribadi. Ini menciptakan lingkungan di mana etika sering kali dikesampingkan demi kepraktisan atau keuntungan politik, mengurangi kualitas dan keadilan dari kebijakan yang dihasilkan, serta merusak integritas sistem pemerintahan secara keseluruhan (Prayetno, 2013).

Demikian di Kabupaten Bima. Dalam proses pembuatan kebijakan publik di Kabupaten Bima, tantangan etis yang dihadapi mencerminkan kompleksitas dalam tata kelola lokal yang mempengaruhi keefektifan dan keadilan dalam layanan publik (Annur, 2013). Latar belakang masalah ini dapat ditelusuri ke berbagai faktor yang mengganggu integritas dan efisiensi proses pembuatan kebijakan. Pertama, konflik kepentingan menjadi masalah kritis, di mana pejabat publik mungkin memiliki kepentingan pribadi atau finansial yang bertentangan dengan tugas mereka untuk melayani kepentingan umum (Studi et al., 2020). Situasi ini sering kali diperparah oleh tekanan dari kelompok kepentingan yang kuat, yang memiliki sumber daya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan demi keuntungan tertentu, sering kali mengorbankan kebutuhan yang lebih luas dari masyarakat. Kedua faktor ini, bersama dengan kurangnya transparansi, menyebabkan kebijakan yang tidak selalu mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, tetapi lebih kepada hasil dari negosiasi dan kompromi di antara pihak-pihak berpengaruh (Prapti & Betiri, 2021).

Lebih lanjut, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan menciptakan ruang bagi praktik nepotisme dan favoritisme, yang mengarah pada distribusi sumber daya yang tidak adil dan efisiensi yang rendah dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Ketika keputusan tidak dibuat berdasarkan data atau kebutuhan nyata tetapi oleh hubungan pribadi atau imbalan, hal ini menimbulkan skeptisisme dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Kehilangan kepercayaan ini berdampak negatif pada partisipasi publik, mengurangi keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi dan menghambat pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan. Akibatnya, efektivitas kebijakan publik berkurang karena kurangnya masukan dan pengawasan dari masyarakat yang seharusnya dilayani oleh kebijakan tersebut (Nikijuluw, 2001).

Dinamika kekuasaan yang ada dalam struktur politik dan pemerintahan Kabupaten Bima juga berperan dalam mempertahankan status quo yang menghambat adopsi praktik baru yang lebih transparan atau bertanggung jawab (Hasanah, 2019). Pemangku kepentingan yang telah berkuasa sering kali menentang perubahan yang dapat mengurangi kontrol mereka atas sumber daya dan proses kebijakan (Yunaida, 2018). Sikap ini tidak hanya memperlambat inovasi dalam tata kelola tetapi juga menghambat implementasi reformasi yang diperlukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Hariatih dan Sukardi, 2022). Tanpa perubahan mendasar dalam cara kebijakan dibuat dan diimplementasikan, sulit untuk mencapai perbaikan nyata dalam transparansi, keadilan, dan efektivitas layanan publik, yang krusial untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bima.

Untuk itu, tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip etika yang diterapkan dalam pembuatan dan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bima. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut menghormati dan mempertahankan dignitas masyarakat, sambil berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada analisis kebijakan yang ada, proses pengambilan keputusan, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap populasi yang miskin. Tujuannya adalah untuk menilai apakah kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan dengan cara yang adil, transparan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, serta untuk mengeksplorasi peran berbagai stakeholder, termasuk pemerintah lokal, kelompok masyarakat, dan lembaga donor dalam proses ini. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu dalam menyusun strategi pengentasan kemiskinan yang lebih etis dan efektif, yang tidak hanya mengurangi angka kemiskinan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan rasa hormat terhadap warga yang terkena dampak.

Urgensi dari penelitian ini timbul dari situasi kemiskinan yang persisten di Kabupaten Bima, yang memerlukan pendekatan baru dalam pembuatan dan implementasi kebijakan untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif dan etis. Penelitian ini penting karena memberikan

pandangan mendalam tentang bagaimana etika kebijakan dapat mempengaruhi efektivitas program pengentasan kemiskinan dan integritas pengambilan keputusan publik. Ini juga menanggapi kebutuhan untuk memperhatikan aspek kemanusiaan dalam kebijakan publik, yaitu menjaga dignitas individu. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap etika kebijakan sebagai kerangka utama dalam menilai dan mengarahkan upaya pengentasan kemiskinan. Ini membawa perspektif baru ke dalam debat pengentasan kemiskinan yang seringkali lebih terfokus pada hasil ekonomi daripada pada proses dan metode yang digunakan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana kebijakan yang tidak hanya efektif dari segi ekonomi tetapi juga kuat dari segi etika dapat merubah cara pemerintah dan masyarakat bekerja bersama dalam menghadapi masalah kemiskinan, sekaligus menginspirasi pembuatan kebijakan serupa di wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa.

METODE

Dalam penelitian tentang etika kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bima, pendekatan metodologis yang diadopsi adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika yang diterapkan dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan. Informan untuk penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari individu yang memiliki peran kunci dan pengalaman langsung terkait dengan kebijakan sosial, termasuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan masyarakat sipil. Proses pengumpulan data dijalankan melalui beberapa metode: wawancara mendalam yang bertujuan untuk menggali pemikiran, persepsi, dan pengalaman informan secara rinci; observasi partisipatif yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai interaksi dan praktik sehari-hari terkait dengan implementasi kebijakan; serta studi dokumentasi yang membantu dalam mengumpulkan data historis dan kontemporer yang relevan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini memberikan lapisan data yang komprehensif, yang kemudian dianalisis menggunakan model iteraktif. Model analisis ini mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, di mana data disederhanakan dan difokuskan; penyajian data, yang mengatur informasi sehingga bisa lebih mudah diinterpretasikan; serta penarikan kesimpulan, di mana peneliti menarik inferensi dari data yang dikumpulkan. Tahapan ini diulang secara siklis untuk memastikan bahwa setiap temuan dan interpretasi yang muncul akurat dan mencerminkan realitas yang ada, memungkinkan penyesuaian perspektif berdasarkan verifikasi data terbaru.

Pendekatan ini memastikan validitas dan reliabilitas temuan, serta mendukung pengembangan rekomendasi yang berbasis bukti untuk pembuatan dan implementasi kebijakan yang lebih etis dan efektif dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memfokuskan pada beberapa indikator penting untuk mengukur efektivitas dan etika dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Indikator pertama adalah transparansi proses kebijakan, yang menilai sejauh mana kebijakan dibuat dan diimplementasikan secara terbuka, memungkinkan akses publik ke informasi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Indikator kedua adalah keadilan distributif, yang mengukur kemampuan kebijakan untuk mendistribusikan sumber daya secara adil di antara semua kelompok masyarakat, khususnya yang paling rentan. Indikator ketiga adalah akuntabilitas, yang mencakup mekanisme yang menjamin pejabat dan institusi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka dalam pengelolaan dan implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian juga memperhatikan indikator keberlanjutan kebijakan, yaitu kemampuan kebijakan untuk menyediakan solusi jangka panjang bagi masalah kemiskinan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dignitas manusia juga menjadi fokus utama, di mana penelitian ini menilai bagaimana kebijakan menghormati dan meningkatkan rasa hormat terhadap individu yang terdampak oleh kemiskinan. Terakhir, indikator keterlibatan masyarakat menilai seberapa besar kebijakan tersebut menciptakan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan, evaluasi, dan reformasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Keseluruhan indikator ini diintegrasikan dalam penelitian untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga dilaksanakan dengan cara yang etis dan mendukung kesejahteraan dan martabat semua warga Kabupaten Bima.

Transparansi Proses Kebijakan

Transparansi dalam proses kebijakan publik merupakan prinsip etika fundamental yang mendukung integritas dan kepercayaan dalam pemerintahan. Dalam konteks kebijakan publik, transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam mengkomunikasikan proses pengambilan keputusan, alasan di balik keputusan tersebut, serta bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan. Transparansi ini penting karena memungkinkan warga negara untuk memantau dan mengevaluasi tindakan pemerintah, yang secara langsung mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam

proses pembuatan kebijakan, yang tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan tersebut tetapi juga menguatkan demokrasi partisipatif. Lebih jauh, transparansi mengurangi risiko korupsi, favoritisme, dan penyalahgunaan wewenang, karena setiap tindakan pemerintah yang dibuat terbuka untuk ditinjau oleh masyarakat dan media. Ini juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik, karena pemerintah yang transparan cenderung dilihat sebagai lebih jujur dan adil. Dalam konteks pengentasan kemiskinan atau isu sosial lainnya, transparansi dalam kebijakan memastikan bahwa program-program yang dirancang benar-benar mencapai kelompok sasaran dan bahwa sumber daya digunakan secara efisien untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, transparansi tidak hanya penting sebagai prinsip etis dalam pembuatan dan implementasi kebijakan publik, tetapi juga sebagai alat vital untuk memastikan keadilan, efektivitas, dan keberlanjutan dalam tata kelola pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa transparansi dalam proses kebijakan publik merupakan aspek krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bima. Keterbukaan ini mempengaruhi bagaimana kebijakan dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi, serta menentukan tingkat kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, transparansi membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar menggambarkan dan mengatasi kebutuhan riil masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan. Ketika proses pembuatan kebijakan terbuka untuk disaksikan dan diawasi oleh publik, hal ini meminimalisir kemungkinan penyelewengan sumber daya dan korupsi, yang sering menghambat efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan. Lebih dari itu, transparansi dalam kebijakan publik di Kabupaten Bima juga berarti bahwa informasi mengenai alokasi anggaran, kriteria penerima manfaat, dan hasil dari implementasi kebijakan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Ini menguatkan akuntabilitas dan memungkinkan masyarakat serta pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Namun, mengefektifkan transparansi dan etika dalam kebijakan publik, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, menuntut lebih dari sekadar menyediakan akses informasi. Ini melibatkan pembangunan kapasitas yang sistematis baik pada level pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bima perlu memastikan bahwa pegawai negeri dan pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip etika dan transparansi. Mereka harus dilatih untuk tidak hanya mengelola sumber daya dengan adil tetapi juga untuk berkomunikasi secara efektif dan terbuka dengan masyarakat tentang tujuan, proses, dan hasil

kebijakan. Di sisi lain, masyarakat perlu diberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam pengawasan kebijakan. Ini termasuk memahami bagaimana mengakses informasi, menginterpretasikannya, dan menggunakannya dalam advokasi atau penyampaian umpan balik kepada pemerintah. Peningkatan kapasitas ini pada kedua sisi akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk transparansi dan akan memperkuat praktik tata kelola yang baik.

Adopsi transparansi yang efektif juga memerlukan penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan dan distribusi informasi. Dengan perkembangan teknologi informasi, Kabupaten Bima memiliki peluang untuk memanfaatkan platform digital dalam meningkatkan transparansi kebijakan. Website resmi, portal data terbuka, dan media sosial bisa menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi kebijakan kepada masyarakat secara luas dan real-time. Hal ini tidak hanya mempercepat penyebaran informasi tetapi juga memperluas jangkauan dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh data terkait kebijakan pengentasan kemiskinan. Selain itu, penggunaan aplikasi mobile dan platform interaktif lainnya dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik dan pengawasan terhadap kebijakan yang sedang berjalan. Teknologi ini juga dapat membantu pemerintah Kabupaten Bima dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara lebih efisien untuk menilai efektivitas kebijakan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Dengan demikian, pengintegrasian teknologi dalam praktek transparansi tidak hanya memperkuat tata kelola yang baik tetapi juga meningkatkan kesempatan untuk kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

Keadilan Distributif

Keadilan distributif sebagai prinsip etika dalam kebijakan publik sangat penting karena menyangkut cara sumber daya dialokasikan dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan harus mempromosikan distribusi yang adil dari manfaat dan beban di antara semua anggota masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, keadilan distributif memastikan bahwa tidak ada kelompok atau individu yang secara tidak proporsional menanggung beban atau secara tidak adil menerima lebih sedikit manfaat dari yang lainnya. Hal ini sangat relevan dalam kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, akses ke layanan umum, dan perlindungan sosial, di mana kesetaraan akses dan keadilan dalam distribusi sumber daya dapat secara langsung mempengaruhi kualitas hidup dan peluang yang tersedia bagi individu. Misalnya, dalam kebijakan pendidikan, prinsip keadilan distributif akan memandu alokasi sumber daya sehingga semua anak, terlepas dari latar belakang ekonomi atau geografis mereka, memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Prinsip ini juga penting dalam konteks fiskal, di

mana kebijakan perpajakan dan alokasi anggaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga mendistribusikan beban pajak dan manfaat pengeluaran pemerintah secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat.

Pentingnya keadilan distributif juga terlihat dalam konteks pengembangan kebijakan yang lebih luas, seperti dalam perencanaan perkotaan dan kebijakan lingkungan. Misalnya, kebijakan yang berkaitan dengan perumahan dan pembangunan infrastruktur harus memperhitungkan kebutuhan kelompok rentan dan mencegah segregasi atau marginalisasi yang tidak proporsional dari beberapa komunitas. Dalam konteks lingkungan, keadilan distributif mengharuskan kebijakan yang dibuat untuk mengatasi perubahan iklim atau polusi tidak hanya efektif tetapi juga adil, memastikan bahwa komunitas yang paling sedikit berkontribusi terhadap masalah lingkungan tidak menanggung beban yang tidak seimbang dari dampak negatif. Oleh karena itu, keadilan distributif tidak hanya fundamental dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik, tetapi juga esensial untuk menjaga legitimasi dan keadilan sosial dalam pemerintahan. Melalui penerapan keadilan distributif, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan publik dan dukungan untuk inisiatif kebijakan, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial dan stabilitas masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa keadilan distributif sebagai pilar etika kebijakan publik telah menjadi fokus utama di Kabupaten Bima dalam mengatasi disparitas ekonomi dan sosial yang signifikan di wilayah tersebut. Inisiatif pemerintah lokal telah melibatkan program-program yang dirancang untuk memastikan alokasi sumber daya yang lebih adil dan inklusif, terutama dalam sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan akses infrastruktur. Dalam sektor kesehatan, misalnya, pemerintah Kabupaten Bima telah mengimplementasikan program subsidi kesehatan yang bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan terjangkau kepada warganya, terutama mereka yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, yang sering kali dilihat sebagai domain dari mereka yang berada di strata ekonomi lebih tinggi. Upaya ini telah disambut dengan baik oleh masyarakat, yang merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Namun, implementasi prinsip keadilan distributif dalam kebijakan publik tidak tanpa tantangan. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah resistensi dari beberapa kelompok masyarakat yang mungkin merasa kehilangan keuntungan relatif mereka akibat redistribusi sumber daya. Ini sering kali muncul dalam bentuk protes atau kritik terhadap program pemerintah yang dirancang untuk membantu kelompok yang lebih marginal. Selain itu, kendala dalam administrasi dan logistik seringkali menghambat pelaksanaan kebijakan yang efisien.

Misalnya, dalam distribusi bantuan sosial, kesalahan data dan kesulitan dalam menjangkau lokasi terpencil menjadi penghalang dalam mencapai distribusi yang benar-benar adil. Pemerintah Kabupaten Bima, dengan sumber daya yang terbatas, terkadang berjuang untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal yang sangat bervariasi, dari daerah pesisir hingga pegunungan yang sulit diakses.

Di sisi lain, keberhasilan program-program tertentu telah menjadi bukti potensi positif dari keadilan distributif. Contoh kasus yang baik adalah pengembangan program pertanian yang memberikan bantuan dan pelatihan kepada petani kecil di Kabupaten Bima. Program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan pendapatan para petani, tetapi juga memperkuat komunitas pertanian dengan menyediakan akses ke teknologi pertanian modern dan pasar. Efek dari kebijakan ini menyebar lebih luas daripada sekadar peningkatan ekonomi lokal; mereka juga membantu dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap fluktuasi ekonomi dan bencana alam, yang seringkali memukul lebih keras di komunitas yang kurang beruntung. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang cermat dan pelaksanaan yang konsisten, kebijakan yang berorientasi pada keadilan distributif dapat membuat perubahan substansial yang berkelanjutan.

Pentingnya pendekatan yang berbasis pada masyarakat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan distributif tidak bisa diabaikan. Dalam banyak kasus, keterlibatan langsung komunitas lokal telah menjadi faktor penentu dalam keberhasilan atau kegagalan program. Misalnya, program pengelolaan sumber daya air yang melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengelolaan dapat lebih efektif dibandingkan dengan solusi yang top-down. Pendekatan ini memastikan bahwa program tidak hanya sensitif terhadap kebutuhan spesifik dari komunitas yang berbeda tetapi juga memberdayakan warga sebagai pemangku kepentingan aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber dayanya. Keterlibatan ini juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama atas hasil kebijakan, yang pada gilirannya mendukung pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kabupaten Bima telah melihat manfaat dari pendekatan inklusif ini, khususnya dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur dan layanan komunal.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip etis kunci yang mendasari kesuksesan kebijakan publik. Prinsip ini menekankan pentingnya pejabat dan lembaga pemerintah untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pemenuhan standar dan regulasi; lebih jauh, ia mengharuskan pemerintah untuk

menjawab secara terbuka dan jujur atas pertanyaan dan kritik yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini sangat penting dalam konteks pengembangan dan implementasi kebijakan publik, di mana kepercayaan masyarakat merupakan aset yang tidak ternilai. Tanpa kepercayaan ini, kebijakan publik mungkin akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan luas, yang pada akhirnya bisa mengurangi efektivitasnya. Selain itu, akuntabilitas juga membantu memperkuat integritas sistem pemerintahan, mengurangi peluang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan menempatkan sistem pengawasan dan kontrol yang efektif.

Dalam konteks pengembangan kebijakan, akuntabilitas memfasilitasi proses yang transparan dan dapat ditelusuri, yang memungkinkan evaluasi yang objektif terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Pejabat publik yang bertanggung jawab atas rancangan dan implementasi kebijakan harus dapat memberikan penjelasan yang mendetail tentang bagaimana keputusan diambil dan dana digunakan. Hal ini termasuk menyediakan akses kepada dokumen-dokumen terkait dan data pendukung yang memungkinkan pihak independen atau masyarakat umum untuk melakukan pemeriksaan dan analisis. Keberadaan mekanisme feedback yang robust, di mana warga negara dapat memberikan masukan atau mengajukan keluhan terkait kebijakan yang diterapkan, juga merupakan aspek penting dari akuntabilitas. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan melalui koreksi dan penyesuaian yang berbasis data dan fakta, tetapi juga menguatkan dialog antara pemerintah dan masyarakat, yang mana adalah esensi dari pemerintahan yang demokratis dan responsif. Akhirnya, penerapan akuntabilitas dalam setiap fase pengembangan kebijakan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya sesuai dengan tujuan awal tetapi juga mempertahankan adaptabilitas dan relevansi dalam menghadapi perubahan kondisi atau kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Prinsip akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bima adalah suatu aspek fundamental yang menentukan keefektifan dan keadilan dalam distribusi bantuan sosial dan layanan kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam konteks ini mengharuskan para pejabat pemerintah dan lembaga terkait untuk tidak hanya mengelola sumber daya secara efisien, tetapi juga untuk menjawab secara terbuka atas keputusan dan tindakan mereka. Ini termasuk tanggung jawab untuk menyediakan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program. Misalnya, dalam program bantuan pangan, akuntabilitas berarti bahwa pemerintah harus dapat menunjukkan bagaimana bantuan tersebut didistribusikan, siapa yang menerima manfaat, dan bagaimana hasilnya diukur. Kualitas akuntabilitas di Kabupaten Bima secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang merupakan kunci dalam menciptakan stabilitas sosial dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

Namun, mengimplementasikan akuntabilitas sering kali menemui berbagai tantangan etis dan praktis. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam banyak kasus, warga mungkin tidak memiliki akses yang cukup atau pemahaman tentang bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan, yang bisa mengurangi efektivitas mekanisme pengawasan yang ada. Selain itu, adanya potensi konflik kepentingan di antara para pembuat kebijakan dapat mengaburkan garis antara tugas dan keuntungan pribadi, sehingga mempersulit implementasi kebijakan yang objektif dan adil. Misalnya, jika seorang pejabat yang bertanggung jawab atas distribusi bantuan memiliki kepentingan dalam bisnis yang bisa menguntungkan dari kebijakan tersebut, ini bisa mempengaruhi keputusan yang diambil, mengorbankan kepentingan umum. Fenomena ini membutuhkan pengawasan yang ketat dan sistem pelaporan yang kuat untuk memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan dapat dijustifikasi dan dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, pengawasan masyarakat adalah komponen penting dalam memperkuat akuntabilitas. Di Kabupaten Bima, ini bisa dilakukan melalui penguatan peran LSM dan organisasi masyarakat sipil yang dapat bertindak sebagai pengamat independen dalam proses pengambilan kebijakan. Mereka dapat membantu mengidentifikasi kesalahan atau penyelewengan dalam penerapan program kesejahteraan, serta menyediakan platform bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan atau keluhan. Proses ini, bagaimanapun, membutuhkan keterbukaan dan kolaborasi aktif dari pemerintah untuk menjadi efektif. Tantangan yang sering muncul adalah resistensi dari pihak berwenang yang mungkin merasa terancam oleh pengawasan eksternal atau kritik publik. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas dan peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi vital dalam membangun fondasi akuntabilitas yang robust.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memainkan peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas di Kabupaten Bima. Pemanfaatan sistem online untuk pelaporan dan monitoring program kesejahteraan sosial bisa mempermudah pelacakan sumber daya dan penyaluran bantuan. Teknologi dapat membantu mengurangi birokrasi dan meningkatkan kecepatan serta akurasi dalam distribusi layanan kepada masyarakat. Namun, tantangan etis seperti keamanan data dan privasi harus dikelola dengan hati-hati. Akses yang tidak terkendali atau penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan masalah baru dan mengikis kepercayaan publik yang telah dibangun. Keseimbangan antara transparansi dan perlindungan privasi adalah kunci untuk memanfaatkan teknologi dalam mendukung akuntabilitas tanpa mengorbankan hak-hak individu. Dengan demikian, pengembangan kebijakan dan praktik yang etis dalam penggunaan teknologi informasi akan sangat penting

dalam menciptakan sistem kesejahteraan yang dapat dipercaya dan diakses oleh semua lapisan masyarakat di Kabupaten Bima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahwa implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang etis dan efektif sangat bergantung pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan distributif, dan akuntabilitas. Transparansi proses kebijakan memfasilitasi pengawasan publik yang lebih luas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengurangi potensi korupsi. Keadilan distributif memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara adil di antara semua kelompok masyarakat, khususnya yang paling rentan, sementara akuntabilitas memperkuat integritas sistem pemerintahan dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat dipertanggungjawabkan. Keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan kebijakan tidak hanya meningkatkan relevansi dan efektivitas kebijakan tetapi juga memperkuat legitimasi dan penerimaan kebijakan di mata publik. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa penguatan prinsip-prinsip ini dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bima akan memperkuat kesejahteraan sosial dan martabat individu, mengarah pada pengentasan kemiskinan yang lebih berkelanjutan dan etis.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas dan etika kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bima, beberapa saran strategis dapat diterapkan berdasarkan temuan penelitian. Pertama, peningkatan transparansi dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang dapat menyediakan akses publik ke data dan informasi terkait kebijakan secara real-time. Kedua, memperkuat sistem akuntabilitas dengan membentuk lembaga independen yang memiliki wewenang untuk mengaudit dan meninjau kebijakan dan pelaksanaannya, serta memperbaiki mekanisme pengaduan publik agar lebih responsif dan transparan. Ketiga, memperluas keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan kebijakan, dari perencanaan hingga evaluasi, melalui pembentukan forum partisipasi yang melibatkan perwakilan masyarakat, LSM, dan stakeholder lainnya. Keempat, fokus pada keadilan distributif dengan memastikan bahwa alokasi sumber daya diberikan secara adil dan prioritas diberikan kepada kelompok yang paling rentan. Terakhir, mengadakan evaluasi dan adaptasi kebijakan secara berkala untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan efektif dalam mengatasi dinamika permasalahan kemiskinan yang berubah-ubah. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Kabupaten Bima dapat mengimplementasikan kebijakan pengentasan

kemiskinan yang tidak hanya berhasil mengurangi angka kemiskinan tetapi juga dilaksanakan dengan prinsip etika dan keadilan yang tinggi, meningkatkan kesejahteraan dan martabat semua warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkarina, I., Farid, N., Wicaksono, E., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2023). *Etika pelayanan publik di kantor kelurahan sumber wetan kecamatan kedopak kota probolinggo*. 1(2).
- Ainley, K. (2017). *Virtue Ethics Book section*.
- Alfianita, E., Wijaya, A. F., & Siswidiyanto. (2015). Revitalization of traditional market based on good governance perspective (a study at Tumpang Market in Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(5), 758–762.
- Annur, R. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 409–426.
- Baumane-Vitolina, I., Cals, I., & Sumilo, E. (2016). Is Ethics Rational? Teleological, Deontological and Virtue Ethics Theories Reconciled in the Context of Traditional Economic Decision Making. *Procedia Economics and Finance*, 39(November 2015), 108–114. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)30249-0](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30249-0)
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Budiman, Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia, & Diella Jauza. (2022). Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 64–74. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.65>
- Chakrabarty, S., & Erin Bass, A. (2015). Comparing Virtue, Consequentialist, and Deontological Ethics-Based Corporate Social Responsibility: Mitigating Microfinance Risk in Institutional Voids. *Journal of Business Ethics*, 126(3), 487–512. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1963-0>
- Dt, K. (2003). Etika Pelayanan Publik. *Demokrasi*, 9(1), 61–70.
- Dwi Urip Wardoyo, Rafiansyah Rahmadani, & Putut Tri Hanggoro. (2021). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.25>
- Grönun, N. J. (2015). A return to virtue ethics: Virtue ethics, cognitive science and character education. *Verbum et Ecclesia*, 36(1), 1–6. <https://doi.org/10.4102/ve.v36i1.1413>
- Halisa, N., Adys, A. K., & Riskasari, R. (2022). Etika Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. ... *Administrasi Publik (KIMAP)*, 3. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/8388%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/8388/5736>
- Hariatih dan Sukardi. (2022). Etika Pelayanan Publik pada Kantor Imigrasi. *Jurnal PenKoMi:Kajian Pendidikan & Ekonomi*, 5(1), 62–74.
- Hasanah, D. I. (2019). Moral dan etika birokrasi dalam Pelayanan publik. *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 48–58.

<https://unibba.ac.id/ejournal/index.php/jisipol/article/view/6%0Ahttps://unibba.ac.id/ejournal/index.php/jisipol/article/download/6/5>

- Ikhsania, Z. (2015). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Pengaruh Implementasi Internal Marketing Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(2), 59–69.
- Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 81. <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.199>
- KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK Mada Sutapa **. (n.d.). 1–9.
- McDonald, G. (2018). Ethical theory. In *Business Ethics*. <https://doi.org/10.1017/cbo9781107445666.015>
- Nikijuluw, V. P. H. (2001). Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. *Makalah PELatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Institut Pertanian Bogor*, 1, 160.
- Palijama, F., Penanganan, T., & Sosial, M. (2022). *Perkembangan teori sosial dan teoritik penanganan masalah sosial di indonesia*. 2, 12–20.
- Prapti, K. P., & Betiri, M. (2021). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Jember Coastal Community Empowerment Strategy in Jember Regency resources). Sejumlah desa pesisir di selatan Jawa Timur merupakan obyek pembangunan dan pengembangan yang Komoditas perikanan tangkap di*. 6(July), 251–265.
- Prayetno. (2013). Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian). *Media Komunikasi FIS*, 12(1), 30–45.
- Putri, L. I. (2017). *Reduksi kemiskinan melalui sociopreneurship*. VI(1), 48–68.
- Rizki Afri Mulia, M. (2022). *Etika Administrasi Publik Penerbit Cv. Eureka Media Aksara*. 25.
- Studi, P., Administrasi, I., Sosial, F. I., & Makassar, U. N. (2020). *MASALAH - MASALAH SOSIAL YANG SERING TERJADI DI INDONESIA MID SEMESTER 1 PENGANTAR SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI Oleh: Raihan Maulana Nasrullah NIM: 200605502067 KELAS: IAN 03 / C 2020*. 1–10.
- Subhan, A. (2017). Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara Di Provinsi Jambi Ditinjau Dari Perspektif Good Governance. *CosmoGov*, 1(1), 86. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11801>
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 14. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16236>
- Syakiran Akmal Ismail, N., Benlahcene, A., Bin Zainuddin, R., & Syakiran Akmal Bt Ismail, N. (2018). A Narrative Review Of Ethics Theories: Teleological & Deontological Ethics A Narrative Review Of Ethics Theories: Teleological & Deontological Ethics. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 23(7), 31–38. <https://doi.org/10.9790/0837-2307063138>
- Wateh, A. (2022). *Analisis Etika Pelayanan Publik Di Kantor Lurah Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru*. 16–75.

- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73–85. <https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11>
- Yunaida, E. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Tenaga Kependidikan (Tendik) terhadap Kepuasan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samudra. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 7(1), 61–72. <https://doi.org/10.33059/jmk.v7i1.758>